



PPKM Darurat Bakal Diterapkan

JOGJA—Pemerintah bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli sebagai respons melonjaknya kasus Covid-19.

Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

Dalam PPKM Darurat tersebut sejumlah sektor diperketat, di antaranya *work from home* (WFH) 100%, restoran hanya boleh layan antar, dan 25% kapasitas mal. Kegiatan olahraga, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan banyak orang juga dilarang.

Namun PPKM darurat ini tidak berlaku

► Gubernur DIY Sri Sultan HB X sudah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (29/6) siang.

► Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, sebelum rapat mengatakan sampai saat ini DIY masih mengefektifkan PPKM Mikro.

di semua daerah, hanya diberlakukan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mendapatkan skor level III dan IV berdasarkan metode penilaian laju penularan kapasitas respons dari World Health Organization (WHO).

Poin lain dalam usulan skema PPKM darurat itu adalah alokasi 70% vaksin diprioritaskan di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi. Selain itu, jumlah *testing* terus ditingkatkan hingga 450.000 per hari.

Kabar mengenai usulan PPKM darurat ini belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Namun, Gubernur DIY Sri Sultan HB X sudah mengikuti rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (29/6) siang. Dalam rapat melalui daring tersebut membahas terkait dengan PPKM Darurat untuk menyikapi tingginya angka kasus penularan Covid-19.

► Halaman 11

PPKM Darurat...

"Pembahasan [rapat] mengenai wacana pemberlakuan PPKM Darurat yang rencananya dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2021," kata Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol (UHP) Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, Selasa (29/6).

Turut mendampingi Sultan dalam rapat tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biworo Yuswanto, dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiana.

Ditya mengatakan dalam rapat tersebut Gubernur memberikan masukan agar pengetatan bisa dilakukan menyeluruh atau tidak hanya satu titik lokasi, misalnya mal. "Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain." Kata Ditya.

PPKM Mikro

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, sebelum rapat mengatakan sampai saat ini DIY masih mengefektifkan PPKM Mikro untuk mengatasi tingginya kasus positif Covid-19 di DIY sejak beberapa hari terakhir. Baskara Aji mengatakan PPKM Mikro tahap pertama dinilai berhasil membatasi kegiatan masyarakat, tetapi akhir-akhir ini masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan.

"Kalau rem darurat dibaca sebagai PPKM lebih ketat bahkan sampai PSBB [Pembatasan Sosial Berskala Besar], bukan kebijakan daerah. Tapi daerah bisa saja mengusulkan. Sampai saat ini belum sampai pada mengusulkan PSBB. Yang dilakukan mengefektifkan PPKM Mikro," katanya.

Namun demikian usulan untuk DIY agar melakukan rem darurat untuk menekan laju penularan Covid-19 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemda DIY dengan melihat perkembangan penularan Covid-19 yang mengkhawatirkan. "Rem darurat sebenarnya Ingub [Instruksi Gubernur] sudah mengatur berkaitan zona dan apa yang harus dilakukan tapi implementasi tidak optimal. Bukan saatnya

lagi memberi tahu masyarakat harus pakai masker, toko tutup jam sekian, tinggal bagaimana disiplin yang harus dilakukan," ujar Baskara Aji.

Ingub No. 16/INSTR/2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro mengatur untuk perkantoran yang masuk dalam zona merah menerapkan WFH 75% dan *work from office* (WFO) 25%, pembelajaran dilakukan secara daring, kegiatan makan minum di warung makan, kafe, atau pedagang kaki lima maksimal 25% dari total kapasitas dan jam tutup operasional hingga pukul 20.00 WIB.

Pelaksanaan di area publik, tempat umum, tempat wisata dan area publik lainnya untuk zona merah ditutup sampai tidak dinyatakan lagi zona merah. Kegiatan peribadatan di masjid, gereja, pura, vihara dan tempat ibadah lainnya ditiadakan sementara. Demikian rapat pertemuan, dan seminar ditutup untuk sementara waktu. Baskara Aji meminta jajaran pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota, kakanewon sampai kalurahan agar menjadi contoh untuk tidak menggelar pertemuan, rapat, seminar atau acara yang dapat mengundang banyak orang.

Baskara Aji menyadari kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY semakin hari semakin meningkat. Saat ini, kata Baskara Aji, zona kabupaten dan kota sudah hampir semuanya masuk dalam zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19, kecuali Kulonprogo yang masih zona oranye atau risiko penularan sedang.

Pemda DIY sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota serta manajemen rumah sakit untuk menambah bed atau tempat tidur khusus pasien Covid-19.

Selain itu, penambahan di luar rumah sakit sudah ada rencana, di antaranya mendukung Rumah Sakit Islam PDHI Kalasan menambah lokasi untuk pasien Covid-19 dengan memanfaatkan Respati sebanyak 30 uang isolasi dan 11 ruang ICU.

Pemerintah Kota Jogja akan menjadikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan milik Kementerian Sosial di Jalan Veteran sebagai

sektor, bahkan akan dikembangkan menjadi rumah sakit lapangan khusus Covid-19. Selain itu Pemda DIY juga mengajukan tenda darurat dan bed yang bisa dipasang di semua rumah sakit rujukan Covid-19.

Saat ini sudah bertambah 39 selter tingkat kalurahan atau kelurahan. Rusunawa Gemawang juga dijadikan sebagai tempat selter. Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) ini memastikan semua biaya akomodasi selter akan ditanggung Pemda DIY melalui Dinas Sosial.

Penambahan Kasus

Sementara itu, penambahan kasus positif Covid-19 di DIY masih tinggi. Pada Selasa ada penambahan 850 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 59.567 kasus.

Penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ini terbanyak dari Sleman (284 kasus), disusul Bantul (272), Jogja (188), Kulonprogo (64), dan Gunungkidul (42). Penambahan kasus positif ini berdasarkan pemeriksaan sampel harian sebanyak 2.377 sampel dan orang yang diperiksa sebanyak 2.535 orang. Total sampel yang diperiksa 346.683 dan total orang diperiksa 320.741 orang.

Ditya Nanaryo Aji mengatakan penambahan kasus positif Covid-19 terbanyak dari *tracing* kontak kasus positif Covid-19 sebanyak 672 kasus. "Sementara dari periksa mandiri 147 kasus, skrining karyawan kesehatan lima kasus, perjalanan luar daerah satu kasus, dan belum ada info [belum diketahui riwayatnya] 25 kasus," kata Ditya.

Pada hari yang sama juga terjadi penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 18 orang. Penambahan kasus meninggal dunia karena Covid-19 ini terbanyak dari Bantul 12 orang, Sleman lima orang, dan Jogja satu orang.

Sementara penambahan kasus sembuh sebanyak 390 kasus, sehingga total sembuh menjadi 48.182 kasus. Penambahan kasus sembuh dari Jogja 27 kasus, Bantul 65 kasus, Kulonprogo 21 kasus, Gunungkidul 67 kasus, dan Sleman 210 kasus.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005